



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1423 /MENKES/SK/X/2003
Tentang
PERTEMUAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN KEPADA DAERAH.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945,
 - b. bahwa desentralisasi kesehatan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan dengan meningkatkan derajat kesehatan yang bermakna yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan nasional dalam mencapai Indonesia Sehat 2010,
 - c. bahwa pembangunan kesehatan dapat dilaksanakan secara berhasil-guna dan berdaya-guna di setiap tingkat administrasi di seluruh wilayah Indonesia, perlu dilakukan sosialisasi kebijakan Pembangunan Kesehatan kepada Daerah,
 - d. bahwa sosialisasi kebijakan Pembangunan Kesehatan kepada Daerah perlu diselenggarakan dalam pertemuan dan ditetapkan dengan Keputusan.
- MENINGGAT** :
1. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan,
 2. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
 3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,
 4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pertemuan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan kepada Daerah.
- Kedua : Peserta Pertemuan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia.
- Ketiga : Penyelenggaraan Pertemuan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan kepada Daerah berlangsung tanggal 13 s.d 16 Oktober 2003.
- Keempat : Susunan Organisasi dan Personalia Panitia Penyelenggara Pertemuan Sosialisasi Kebijakan sebagaimana terdapat dalam Lampiran.
- Kelima : Penanggungjawab Pertemuan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan kepada Daerah bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan atas seluruh penyelenggaraannya.
- Keenam : Panitia Pengarah bertugas dan bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyusun kebijakan Pembangunan Kesehatan yang akan disosialisasikan kepada peserta Daerah.
- Ketujuh : Panitia Penyelenggara bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pertemuan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan kepada peserta Daerah.
- Kedelapan : Segala pembiayaan Penyelenggaraan Pertemuan tersebut dibebankan pada Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Tahun 2003 dan sumber lainnya yang tidak mengikat.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kesembilan : Selesai melaksanakan tugasnya, Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Kesehatan melalui Penanggung Jawab.
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN : DI JAKARTA
PADA TANGGAL : 3 OKTOBER 2003

MENTERI KESEHATAN, *kr*


Dr. Achmad Sujudi

Salinan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
5. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
7. Para Direktur Jenderal di lingkungan Depkes.
8. Para Kepala Badan di lingkungan Depkes.
9. Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara Bidang Kesehatan.
10. Kepala KPKN Jakarta V di Jakarta.
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia.
12. Yang Bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Kepmenkes

Nomor : 1423/Menkes/SK/X/2003

Tanggal : 3 Oktober 2003

**PENYELENGGARA PERTEMUAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN KEPADA DAERAH**

- I. Pelindung/Penasehat : Dr. Acmad Sujudi
- II. Penanggung Jawab : Dr. Dadi S. Argadiredja, MPH
- III. Ketua Panitia Pengarah : Dr. Dini Latief, MSc
- Sekretaris I : Dr. Gunawan Setiadi, MPH
- Sekretaris II : Dr. Suwandi Makmur, MM
- Sekretaris III : Dr. Setiawan Soeparan, MPH
- Anggota : 1. Prof. DR.Dr. Azrul Azwar, MPH
2. Dr. Sri Astuti Suparmanto, MSc, PH
3. Prof. Dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH, PhD
4. Drs. Holid Djahari, Apt, MM
5. Dr. Sumaryati Arjoso, MPH
6. Dr. Irhamsyah Ratu Bagus, SKM
7. Drs. Richard Panjaitan, Apt. SKM
8. Dr. Muharso, SKM
9. Dr. I. Nyoman Kandun, MPH
10. DR. Dr. Anhari Achadi, MPH
11. Dr. Ieke Irdjati S.A, MPH
12. Drg. Naydial Roesdal, MSc. PH
13. Dr. Sjafii Ahmad, MPH
14. Drs. HM. Krisna Tirtawidjaja, Apt
15. Dr. Deddy Ruswendi, MPH
16. A. Choliq Amin, SE, MM
- IV. Ketua Panitia Penyelenggara : Dr. Setiawan Soeparan, MPH
- Wakil Ketua Penyelenggara : Dr. Bambang Sardjono, MPH
- Sekretaris I : Drs. Abdurachman, MPH
- Sekretaris II : Ir. Herwanti Bahar, MSc
- Anggota : 1. Dra. Nasirah Bahaudin, MM.
2. Dr. Lily Sri Wahyuni Sulistyowati
3. Drg. Mariani Reksoprodjo.
- Anggota Sekretariat : 1. Iswandi Mourbas, SKM, MPPM
2. Drs. Sawidjan Gunadi, Mkes
3. RJ. Sukowidodo, SKM, MPH
4. Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS
5. Drs. Ungkap Rumahorbo
6. Nurhayati Simanjuntak, BSc.
7. Darmayanti, SKM
- V. Koordinator Panitia Penyelenggara Daerah : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah

MENTERI KESEHATAN,



Dr. Achmad Sujudi